

**KAPASITAS PENDAMPING LOKAL DESA
DALAM PENDAMPINGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**
*(Penelitian di Desa Butas Bagu, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan,
Kalimantan Utara)*

SKRIPSI



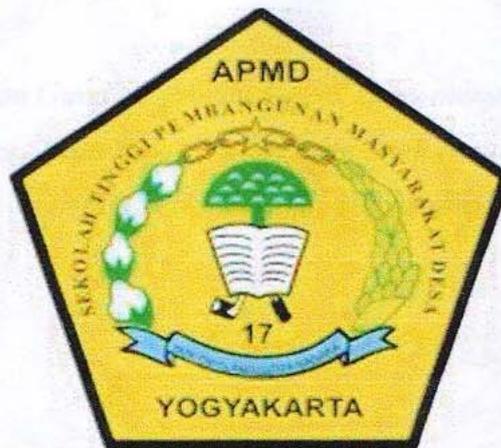
Disusun Oleh:

**RONIDIANTO
14520019**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
2018**

**KAPASITAS PENDAMPING LOKAL DESA
DALAM PENDAMPINGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**
*(Penelitian di Desa Butas Bagu, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan,
Kalimantan Utara)*

SKRIPSI



Disusun Oleh:

**RONIDIANTO
14520019**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**

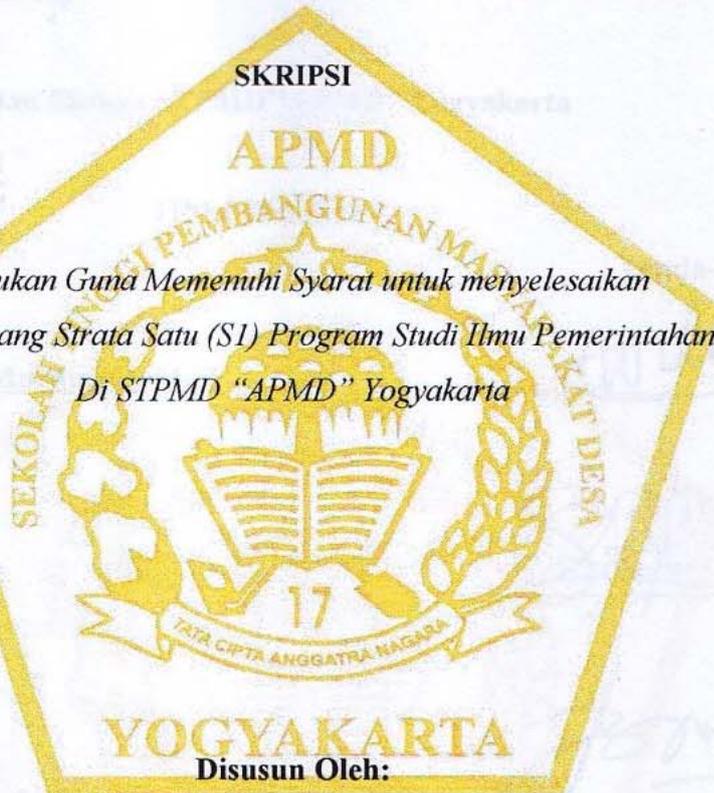


**KAPASITAS PENDAMPING LOKAL DESA
DALAM PENDAMPINGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**
*(Penelitian di Desa Butas Bagu, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan,
Kalimantan Utara)*

SKRIPSI

APMD

*Diajukan Guna Memenuhi Syarat untuk menyelesaikan
Studi Jenjang Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan
Di STPMD "APMD" Yogyakarta*



Disusun Oleh:

RONIDIANTO

14520019

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**



HALAMAN PENGESAHAN
TELAH DI UJI DAN DI PERTAHANKAN DI DEPAN TIM PENGUJI
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN
MASYARAKAT DESA"APMD"
YOGYAKARTA

Pada Hari : KAMIS
Tanggal : 22 Maret 2018
Waktu : 12.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD"APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama :

Tanda-tangan:

1. **Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M.Si**

Ketua / Pembimbing

2. **Drs. Hastowiyono, M.S**

Penguji Samping I

3. **Ir. Muhammad Barori, M.Si**

Penguji Samping II



Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Gregorius Saldan, S.IP, MA

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
STPMD"APMD" YOGYAKARTA
2018

MOTTO

*Mata mu adalah pelita tubuhmu, jika mata baik
Teranglah seluruh hidup mu, tetapi jika matamu jahat,
gelaplah tubuh mu
karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu
jangan menjadi kegelapan
(lukas 11:34-35)*

*Aku berencana tetapi Allah yang berkehendak
Ketika aku menginginkan sesuatu tapi tak kunjung juga aku dapatkan
Aku tak akan menyerah
Sebab aku percaya
Allah sedang merancang sesuatu yang lebih baik
Dari apa yang ku bayangkan*

*Berhentilah menyesali mulailah mensyukuri
Berhentilah meragukan Dan
Mulailah melakukan
(Ronidianto)*

PERSEMBAHAN

Dengan Ketulusan dan Kerendahan Hati Aku Haturkan

*Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yesus Kristus Karena telah Melimpahkan Kasihnya yang
Tak Ternilai*

Kupersembahkan Karya Kecilku Ini Kepada:

Bapak dan Mama Tercinta

Karya Yang Tidak Seberapa ini Ku persembahkan sebagai

bukti rasa cinta dan tanggungjawabku,

semoga hasil perjuanganku selama kuliah bisa buat bapak dan mama bangga

Terimah Kasih untuk saudara seperjuangan di Ilmu

Pemerintahan serta para pendidikku Pahlawan Tanpa Jasa

Yang ku Hormati

Almamater Tercinta Sekolah Tinggi Pemabangunan Masyarakat Desa"APMD"

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Oleh karena kasih sayang-Nya dalam hidupku sehingga dalam setiap bentang waktu yang ada saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.

Adapun keberhasilan penyusun dalam menulis tidak terlepas dari bantuan bahkan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, karena itu pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Habib Muhsin S.Sos, M.Si, selaku ketua STPMD"APMD" Yogyakarta.
2. Bapak Gregorius Sahdan, S,IP, M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan.
3. Bapak Drs. YB. Widyo Hari Murdianto, M.Si, selaku Dosen Pembimbing
Terimakasih telah banyak memberikan bimbingan dan arahan bahkan petunjuk kepada penyusun.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf STPMD"APMD" yang banyak membantu penyusun selama perkuliahan selama ini.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewah Yogyakarta yang telah memberikan ijin penelitian.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nunukan yang telah memberikan ijin penelitian.
7. Kepala Desa Butas bagu yang telah bersedia menerima penyusun untuk penelitian.
8. Kedua Orang Tua ku, Ayah dan Ibu Terima kasih atas semua kasih sayang dan cinta yang luar biasa. Terima kasih doa, penyertaan kesabaran dan segala sesuatu yang telah di berikan kepadaku selama ini. Terima kasih selalu menjadi motivasi dan penguat dalam setiap ritme kehidupan yang ku jalani.

9. Kaka Ellyas, Kaka Buas, Kaka Jumain, Kaka Lewi, Kaka Y.Dayat, Kaka Alpan, Kaka Haini, Kaka Piana dan adik ku Novianti terima kasih atas doa dan dukungannya terutama dalam membantu membiayai perkuliahan saya.
10. Terima kasih kepada semua kaka ipar ku yang selalu mendukung dan mendoakan ku selama dalam perkuliahan.
11. Sahabat Seperjuangan Rano S.IP, Kornelis Hotman S.IP terima kasih atas dukungan dan doa serta canda tawa, kebersamaan selama menempuh pendidikan di kota Yogyakarta
12. Organisasi-organisasi PMDA-KU, IKPM-KN, IKPM-KU, KOMAP, GMNI Yogyakarta. Terima kasih kerjasamanya dan tetap berjuang tetap semangat dalam membangun organisasi lebih baik lagi.
13. Untuk teman-teman seperjuangan, Mikail, Asbiju, Bayu terima kasih atas dukungannya selama ini, tetap semangat saya yakin kita pasti bisa.
14. Untuk teman-teman ASPURA Nunukan, terimah kasih atas kerjasama dan kenangan terindah selama ini kita jalani bersama, tetap berjuang dan raih cita-cita dan tetap semangat.
15. Kepada seluruh Pihak yang turut membantu penulis yang tidak dapat di sebut satu persatu melalui halaman ini penulis juga mengahaturkan banyak terima kasih.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jahu dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta.....2018

RONIDIANTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	7
1. Kapasitas Pendamping Lokal Desa	7
2. Penguatan Kapasitas	14
3. Pendamping Lokal Desa	21
4. Pendampingan	24
5. Perencanaan	28
6. Pembangunan	39
7. Desa	45
F. Ruang Lingkup	51
G. Metode Penelitian	54
a. Jenis Penelitian	52
b. Unit analisis	53
c. Teknik Pengumpulan Data	56
1. Teknik Observasi	58
2. Teknik Wawancara Mendalam (In-Depth Interviewing)	58
3. Teknik Dokumentasi	59
d. Teknik Analisis Data	59

BAB II DESKRIPSI PROFIL DESA	62
A. Sejarah Desa	62
1. Sejarah Desa Butas Bagu	62
B. Kondisi Umum Desa	64
1. Demografi	63
2. Keadaan Sosial Budaya.....	67
3. Keadaan Ekonomi.....	69
4. Pemanfaatan Lahan.....	71
5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa	76
C. Gambaran Umum.....	84
1. Struktur Pelaksanaan Pendamping Lokal Desa.....	84
2. Profil Pendamping Lokal Desa Kecamatan Sembakung	84
 BAB III ANALISIS KAPASITAS PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PENDAMPINGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA	 86
A. Pembahasan	86
1. Kemampuan Intelektual dalam Perencanaan pembangunan	86
2. Keahlian Keterampilan	90
3. Upaya Yang Telah Dilakukan Dalam Meningkatkan Kapasitas	93
4. Kemampuan Institusional (lembaga)	99
1. Budaya Organisasi	101
2. Kerjasama	101
 BAB IV PENUTUP	 106
A. Kesimpulan	106
1. Kemampuan/Intelektual	106
2. Keahlian/Ketrampilan	106
3. Upaya Dalam Meningkatkan Kapasitas/kemampuan	107
4. Kemampuan Institusional (lembaga)	107
B. Saran	107
 DAFTAR PUSTAKA	 109
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Menurut Tingkat Pendidikan	54
Tabel I.2 Menurut Pengalaman Kerja	55
Tabel I.3 Menurut Umur	56
Tabel I.4 Menurut Jenis Kelamin.....	56
Tabel I.5 Menurut Agama	57
Tabel II.I Jumlah penduduk Desa Butas Bagu	65
Tabel II. 2 Tingkat pendidikan Desa Butas Bagu.....	67
Tabel II. 3 Ketersediaan sarana dan prasarana	68
Tabel II. 4 Mata pencaharian Desa Butas Bagu	70
Tabel II. 5 Nama pejabat pemerintahan Desa Butas Bagu.....	82
Tabel II. 6 Nama pengurus dan anggota BPD Desa Butas Bagu.....	83
Tabel II. 7 Nama pengurus dan anggota Karang Taruna Desa Butas Bagu	83
Tabel II. 9Nama pengurus PKK Butas Bagu.....	83
Tabel II. 10 Profil pendamping Desa Kecamatan Sembakung.....	95

ABSTRAK

Dalam menghasilkan sebuah pembangunan perlu adanya pendampingan agar pembangunan tersebut benar-benar terarah dan di rasakan oleh masyarakat itu sendiri. Maka kapasitas pendamping lokal desa di tuntut agar mampu merespon berbagai persoalan di masyarakat, baik untuk kepentingan taraf kehidupan ekonomi, keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan sosial masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas pembangunan perlu di sertai dengan kemampuan seorang pendamping baik secara individu maupun secara kelembagaan, sehingga pembangunan yang di hasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perencanaan suatu pembangunan perlu di dampingi. Pokok permasalahan yang muncul dalam proses perencanaan pembangunan adalah kemampuan secara personal (individu) dan kemampuan secara lembaga (institusi). Kemampuan secara individu dalam pengertian apa kah dalam pendampingan perencanaan pembangunan pendamping lokal desa memiliki keampuan/intelektual, keahlian/keterampilan. Secara institusional (lembaga) bagaimana budaya organisasi yang ada yang di ukur dengan sikap dan kerjasama pendamping lokal desa di ukur dengan koordiansi dan komunikasi. Oleh sebab itu penyusun dalam menyusun skripsi ini mengambil judul: “KAPASITAS PENDAMPING LOKAL DESA DALAM PENDAMPINGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN”

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang akan menjadi petunjuk arah penelitian ini dalam mendiskripsikan dan mendalami permasalahan-permasalahan didalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan teknik Dokumentasi, Wawancara dan observasi, sedangkan informan penelitian ini adalah, Kepala Desa Butas bagu orang, Sekretaris Desa 1 orang, BPD 5 orang, Ketua PKK 1 orang, Pendamping Lokal Desa 1 orang, masyarakat 3 orang.

Dari hasil penelitian bahwa di temukan bahwa kapasitas pendamping lokal desa dalam pendampingan perencanaan pembangunan suda cukup baik terutama dalam kemampuan/intelektual, keahlian/keterampilan dalam perencanaan pemabangunan serta budaya organisai melaui sikap kersama suda sangat baik. Hali ini di ketahui dengan adanya kordinasi, komunikas pendamping lokal desa dan pemerintah desa dalam pendampingan perencanaan pembangunan.

Kata kunci : Kapasitas, Pendampingan, Perencanaan Pembangunan.

A. Latar Belakang

Kehadiran Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menandai babak baru dan perubahan dalam politik pembangunan nasional, dimana Desa menjadi titik tumpu yang mendapatkan perhatian serius. UU Desa diyakini sebagai gerbang harapan menuju kehidupan berdesa yang lebih maju. Sebagai dasar hukum bagi keberadaan Desa, UU Desa mengonstruksi cara pandang baru praksis berdesa (pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa). Desa diakui dan dikukuhkan sebagai subjek yang mengatur dan mengurus dirinya sendiri.

UU Desa menerangkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa.

Berkaitan dengan hal itu sangat penting mengingat kondisi objektif dan dinamika desa-desa di Indonesia yang secara umum masih memprihatinkan. Desa identik dengan ketertinggalan dalam semua aspek kehidupan. Kewenangan mengatur dan mengurus dirinya sendiri yang dibarengi dengan memberikan hak-hak desa, sehingga desa memiliki kemampuan finansial yang memadai guna melaksanakan kewenangannya, sebagaimana ditegaskan UU Desa, menjadi faktor penggerak peningkatan pembangunan desa yang sekaligus menjadi ruang krusial implementasi UU Desa.

Pembangunan Desa sebagai sistem yang dikonstruksi UU Desa, sehingga menempatkan masyarakat pada posisi strategis, sebagai subjek pembangunan. Dengan demikian, masyarakat memiliki ruang dan peran strategis dalam tata kelola Desa,

termasuk di dalamnya perencanaan pembangunan Desa. Isu penting dalam konteks ini adalah peningkatan keberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki daya desak yang efektif untuk mewujudkan tata kelola Desa yang baik dan perencanaan pembangunan yang sesuai dan memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam kerangka itulah, Pemerintah menetapkan kebijakan pendampingan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015, yang bertujuan:

- Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
- Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
- Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor; dan
- Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

Perbedaan mendasar model pendampingan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah adanya tuntutan terhadap para Pendamping Desa untuk mampu melakukan transformasi sosial dengan mengubah secara mendasar pendekatan kontrol dan mobilisasi pemerintah terhadap desa menjadi pendekatan pemberdayaan masyarakat desa. Masyarakat desa dan pemerintah desa sebagai satu kesatuan *self governing community* diharapkan mampu hadir sebagai komunitas mandiri.

Dengan demikian, desa didorong menjadi subyek penggerak pembangunan, sehingga mampu merealisasikan salah satu agenda strategis pemerintahan yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa No. 3 Tahun 2015 tentang pendampingan Desa Memberikan keistimewaan bagi masyarakat dan bertambah dengan adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perangkat Desa. Meskipun sudah ada tentang peraturan perangkat Desa, namun masih banyak kegagalan dalam menjalankan pemerintahan di Desa seperti halnya pendampingan Desa belum efektif dalam menjalankan Pendampingan Desa.

Tentu keberadaan Pendamping Desa ini harus bergerak cepat dalam membangun strategi, dalam pendampingan di Desa. Keberadaan pendamping Desa dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat Desa setempat. Seperti halnya dalam Peraturan Menteri No. 3 Tahun 2015 tentang pendamping Desa bahwa Pendamping adalah bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dalam hal ini tugas pendamping Desa adalah:

1. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pembangunan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa.
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru.

6. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif.
7. Melakukan koordinasi pendampingan Desa di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendamping oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.

Salah satu faktor penentu keberhasilan pendampingan adalah kapasitas pendamping, khususnya PLD. Kapasitas dimaksud menunjuk pada kompetensi yang mencakup: (1) pengetahuan tentang perspektif dan kebijakan UU Desa, (2) keterampilan teknis dan fasilitasi pemerintah dan masyarakat Desa dalam mewujudkan tata kelola Desa yang baik, dan (3) sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kinerja pendamping profesional.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yang berkaitan dengan kemampuan pendamping dalam pendampingan belum efektif. Kendala yang terjadi karena belum maksimalnya pendampingan yang dilakukan oleh pendamping Lokal Desa terutama dalam pendampingan. Seharusnya dengan keberadaan Pendamping Lokal Desa tersebut mampu membina masyarakat khususnya dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Pentingnya desa memiliki perencanaan karena desa harus mengatur dan mengurus sesuai dengan kewenangannya sebagai komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Artinya, perencanaan desa akan semakin memperkuat hak dan kewenangan desa sekaligus mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan desa sebagai kekuatan utama membangun desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan, proses perencanaan menjadi kunci dalam pelaksanaan pembangunan, nilai nilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak menjadi hilang namun memperkuat Pemerintahan Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan. Ini sangat jelas dalam Pasal 80 ayat 1 undang Undang Desa No 6 Tahun 2014 bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Dalam menyusun perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Dalam era undang Undang Desa No 6 tahun 2014 ini upaya pemerintah semakin nyata dalam memberikan kewajiban jelas bahwa perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat, dengan demikian masyarakat diharapkan aktif terlibat dalam perencanaan pembangunan agar cita-cita pembangunan ekonomi masyarakat dapat tercapai.

Desa seharusnya tidak lagi selalu “menunggu petunjuk dari tingkat atas” dalam menyelenggarakan urusan dirinya sendiri, namun fakta menunjukkan bahwa desa belum bisa merencanakan pembangunan sesuai dengan apa yang di inginkan seharusnya keberadaan Pendamping Lokal Desa, mampu memperbaiki permasalahan yang ada di desa. Terlebih lagi manakala pembangunan tersebut diintimidasi dengan kepentingan politik lokal desa, yang tidak lagi memandang kebutuhan masyarakat sebagai suatu yang prioritas, dan hanya mementingkan kepentingan segelintir orang maupun suatu kelompok tertentu. Lemahnya perencanaan di desa, menjadi hambatan tersendiri bagi desa, dalam hal ini bisa dikarenakan aspek ketidaktahuan para aparat desa ataupun rendahnya sumberdaya manusia yang ada di desa sehingga tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar.

Keterbatasan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia, yang ada di desa tidak mendukung sehingga tidak mampu sedikit pun membawa perubahan di desa seharusnya keberadaan Pendaamping Lokal Desa bisa membawa perubahan bagi desa khususnya dalam perencanaan pembangunan. Seperti halnya di desa butas bagu kecamatan sembakung dalam perencanaan pembangunan sering kali tidak melihat

situasi dan kondisi yang ada di desa. Hal ini bisa dilihat dari pembangunan yang ada di Desa Butas Bagu yang semakin hari terbengkalai karena dalam perencanaan sebelumnya tidak dipertungkan keseluruhan anggaran yang di butuhkan. Dari persoalan ini bahwa permasalahan yang sesungguhnya dari kemampuan pemerintah desa belum cukup dalam merencanakan suatu pembangunan.

Melihat fenomena dan permasalahan di atas, peneliti menilai penting untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya Kapasitas Pendamping Lokal Desa dalam Pendampingan Perencanaan Pembangunan Desa. Oleh sebab itu, jika didasarkan pada permasalahan di atas, maka peneliti mengangkat judul penelitian yakni “Kapasitas Pendamping Lokal Desa Dalam Pendampingan Perencanaan Pembangunan di Desa Butas Bagu Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana Kapasitas Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Pendampingan Perencanaan Pembangunan”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penulisan Karya ini antara lain:

1. Secara spesifik tujuan yang ingin di capai oleh peneliti yaitu untuk menggambarkan Kapasitas Pendamping Lokal Desa (PLD) dalam Pendampingan Perencanaan Pembangunan di Desa.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi Kapasitas dari Pendamping Lokal Desa (PLD) Dalam Pendampingan Perencanaan Pembangunan, serta dapat di gunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti dan pihak lain yang tertarik dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anneli Milen, 2004, *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas, PEMBAHARUAN*
(Program Penguatan Prakarsa Pembaharuan Kabupaten) Yogyakarta.
- Adi Rustanto, 2012, *Kapasitas Anggota DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi*
Skripsi STPMD”APMD
- Awang ,Azam H.2010. *implementasi pemberdayaan pemerintah desa*. Yogyakarta.
Pustaka Pelajar.
- Conyers, Diana. (1991), *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga Suatu Pengantar*, Yogyakarta:
Gajah Mada University Press.
- Daeng Sudirwo. (1985).*Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*.
Bandung: Aksara.
- Dadang Juliantara, 2000, *Arus Bawah Demokrasi*, Yogyakarta,
Lapera Pustaka Utama.
- Efraim Datatonglong Ruruk. 2013. *Kapasitas DPRD dalam proses*
penyusunan kebijakan (Skripsi). STPMD ”APMD”.
- Eko Sutoro (2005). *Pemberdayaan kaum marginal*, APMD Press Yogyakarta,
- Hardono Hadi. Dkk, *Memperisap Strategi Peningkatan Kapasitas,*
Pemerintahan Desa, SATUNAMA, Yogyakarta.
- H. Khairuddin Drs. 1992. *Pembangunan Masyarakat*.
Yogyakarta Liberty
- Kessa Wahyudin. 2015. *Perencanaan pembangunan Desa*. jakarta. Kementrian Desa,
Pemabangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Lanter alimdani, 2016, *Pendampingan Kader Pendidik Anak Usia Dini*
Skripsi STPMD”APMD
- Lexy. J. Moleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

- Miles, M.B. dan Hubberman. 1993. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang MetodeMetode Baru*. UI Press: Jakarta.
- Malayu Hasibuan. (1993). *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: CV. Haju Masagung.
- Prastowo Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Djuni Pristiyanto, 2015. *Panduan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Desa penanggungjawab*. Jakarta. Yayasan penabulu.
- Riyadi dan Bratakusumah. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Stanli Miler Hopaya. 2014. *Dinamika Stakholder Dalam Memformulasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa* (skripsi) STPMD"APMD"
- Serdamayanti, DR, M.Pd. 2001. *Sumberdaya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2007, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta; Bandung.
- Sondang P. Siagian. (1991). *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat ; Sebuah Pendekatan Konsep*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soewignjo. (1985). *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sudarmanto (kotter dan Haskett: 1997), *kinerja dan pengembangan kompetensi SDM*,
Pustaka pelajar, yogyakarta, 2009

Soetardjo Karto Hadi Koesoemo, 2000, *Desa*, Bandung, Sumur.

Widjaja Haw. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat & Utuh*.
Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pendampingan Desa

Sumber Internet:

Asrori. 2014. *Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan*

Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kudus. <https://media.neliti.com/media/publications/52172-ID-kapasitas-perangkat-des-dalam-penyeleng.pdf>. di akses pada tanggal 23-09-2017

Mutiara Fisip. 2013. *Judul Pengembangan Kapasitas Organisasi (Capacity Building)*.

http://mutiara-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-75610-Pengembangan%20Kelembagaan-
di akses pada tanggal 23-09-2017

Rino Arnold. 2016. *Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Dalam Peningkatan Prestasi
Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) Universitas Lampung*.

<http://digilib.unila.ac.id/23054/1/1.%20ABSTRAK.pdf>. Di akses pada tanggal 27-09-2017